



**PENERAPAN PSAK NOMOR 101 PADA BMT SAKINAH MASJID
BABURRAHIM NAGARI BATUBASA KECAMATAN PARIANGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi*

**REZA REZITA
12 231 063**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH / AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BATUSANGKAR

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Reza Rezita
NIM : 12 231 063
Tempat / Tanggal Lahir : Pesisir Selatan/ 18 Agustus 1992
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PENERAPAN PSAK NOMOR 101 BMT SAKINAH MASJID BABURRAHIM NAGARI KECAMATAN PARIANGAN"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 Februari 2017
Saya yang menyatakan



Reza Rezita
NIM. 12 231 063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

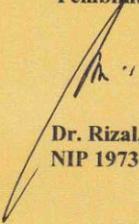
Pembimbing skripsi atas nama **REZA REZITA**, NIM 12 231 063 dengan judul: **“PENERAPAN PSAK NOMOR 101 PADA BMT SAKINAH MASJID BABURRAHIM NAGARI BATUBASA KECAMATAN PARIANGAN”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

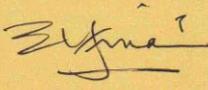
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Februari 2017

Pembimbing I

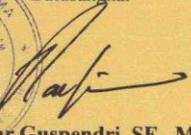
Pembimbing II


Dr. Rizal, M.Ag.
NIP 19731007 200212 1 001


Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA.
NIP 19740623 200003 2 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar




Nasfizar Guspendri, SE., M.Si.
NIP 19750823 200312 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **REZA REZITA NIM 12 231 063** berjudul **“Penerapan PSAK Nomor 101 Pada BMT Sakinah Mesjid Baburahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan”**, telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1).

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Rizal, M.Ag. NIP. 19731007 200212 1 001	Ketua Sidang		7/3/2017
2	Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA. NIP. 19740623 200003 2 002	Sekretaris Sidang		7/3/2017
3	Husni Shabri, M.Si NIP. -	Anggota I		06/03/2017
4	Khairul Marlin, SE.,M.Kom.,MM NIP.-	Anggota II		01/03/2017

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar




Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

ABSTRAK

Reza Rezita, Nim 12 231 063, dengan judul skripsi **“PENERAPAN PSAK NOMOR 101 PADA BMT SAKINAH MASJID BABURRAHIM NAGARI BATUBASA KECAMATAN PARIANGAN”**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Kosentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2017.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi masalah adalah bagaimana penyajian laporan keuangan BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan berdasarkan PSAK Nomor 101. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan laporan keuangan BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan setelah menerapkan PSAK Nomor 101.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu membandingkan antara penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan dengan standar penyajian laporan keuangan syariah yaitu PSAK NO.101. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang dibuat oleh BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan periode 2014-2015.

Hasil dari penelitian ini adalah BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan belum menerapkan PSAK Nomor 101 untuk pelaporan keuangannya. BMT Sakinah hanya membuat dua jenis laporan keuangan, sedangkan menurut PSAK No.101 ada tujuh jenis laporan keuangan. Dari tujuh jenis laporan keuangan berdasarkan PSAK No.101 hanya empat jenis laporan keuangan yang bisa diterapkan pada BMT Sakinah, dikarenakan tidak adanya data.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PSAK NOMOR 101 PADA BMT SAKINAH MASJID BABURRAHIM NAGARI BATUBASA KECAMATAN PARIANGAN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Kosentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Selanjutnya shalawat beserta salam, semoga tercurah buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan bekal bagi umatnya yaitu Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan dunia dan diakhirat. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung dan tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada Nasrizal (Ayah) Mardianis (Ibu) yang telah mencurahkan rasa kasih sayang terhadap penulis baik berupa moril, spiritual maupun materil serta selalu memberi support kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan segala hormat penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, MA., selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
3. Bapak Gampito, SE.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing Akademik.
4. Dr. Rizal, M.Ag., selaku Pembimbing I.
5. Ibuk Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA., selaku Pembimbing II.

6. Bapak Husni Sabri., selaku penguji I.
7. Dr. Nofrivul, SE., MM., selaku Penasehat Akademik.
8. Bapak, Ibuk Dosen dan Staf Administrasi IAIN Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu pengalaman kepada penulis yang terus akan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.
9. Ketua BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan Bapak Miftah Novi.
10. Keluarga besar penulis yang selalu menjadi penyemangat dalam perkuliahan penulis, kata-kata selalu terucap penuh makna dan arti, selalu memberi motivasi penulis untuk tercapainya suatu cita-cita.
11. Keluarga besar Ekonomi Syariah yang telah memberi masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan menjadi amal ibadah disisi-Nya. Amin.

Batusangkar, Februari
2017
Penulis,

Reza Rezita
12231063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iv**

DAFTAR TABEL **vii**

DAFTAR GAMBAR **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan Penelitian 8

F. Manfaat Penelitian 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akuntansi Secara Umum dan Akuntansi Syariah

1. Akuntansi Syariah 9

2. Landasan hukum Akuntansi Syariah 9

3. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah 11

4. Prinsip Akuntansi Syariah 12

B. PSAK Syariah	
1. Tujuan PSAK No. 101	15
2. Ruang Lingkup	15
3. Tujuan Laporan Keuangan	16
C. Penyajian Laporan Keuangan PSAK 101	
1. Laporan Posisi Keuangan	20
2. Laporan Laba Rugi	24
3. Laporan Perubahan Ekuitas	25
4. Laporan Arus Kas	26
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	27
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	28
7. Catatan Atas Laporan Keuangan	29
D. <i>Baitul Maal Watamwil</i> (BMT)	
1. Pengertian <i>Baitul Maal Watamwil</i> (BMT)	32
2. Tujuan dan Fungsi <i>Baitul Maal Watamwil</i> (BMT)	33
3. Prinsip dan Produk Inti <i>Baitul Maal Watamwil</i> (BMT)	33
4. Sumber Dana <i>Baitul Maal Watamwil</i> (BMT)	35
5. Sistem Bagi Hasil VS Sistem Bunga	37
6. Operasional <i>Baitul Maal Watamwil</i> (BMT)	38
E. Penelitian Relevan	40
F. Kerangka Berpikir	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Waktu dan Tempat Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	44

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa	
1. Sejarah Pendirian BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa...	46
2. Visi dan Misi Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa.....	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Laporan Laba Rugi.....	53
2. Laporan Perubahan Ekuitas.....	55
3. Laporan Posisi Keuangan.....	57
4. Laporan Arus Kas.....	62
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.....	64
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	65
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Neraca.....	4
Tabel 1.2	Laporan Laba Rugi BMT Sakinah.....	5
Tabel 4.1	Laporan Laba Rugi.....	54
Tabel 4.2	Laporan Perubahan Ekuitas.....	57
Tabel 4.3	Laporan Posisi Keuangan.....	60
Tabel 4.4	Laporan Arus Kas.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Berpikir.....	43
Gambar 1.2	Struktur Organisasi.....	49

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat, juga dapat dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan berprinsip syariah. Munculnya lembaga keuangan berprinsip syariah ini merupakan bentuk dari suatu penolakant terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan nilai tambah yang diperoleh berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok. Pada lembaga keuangan syariah, secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syariah.

Dalam Islam, konsep akuntansi yang dikembangkan memperhatikan segala aspek yang ada di alam semesta. Tujuan akuntansi Islam adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Aspek akuntansi syariah seperti aspek keadilan dan kebenaran.¹

Seiring dengan itu akuntansi syariah di Indonesia juga ikut berkembang sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan lahirnya beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah. Di Indonesia PSAK syariah yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjadi standar bagi lembaga keuangan syariah dalam mencatat dan menyusun laporan keuangannya.

Pada awal perkembangannya, standar akuntansi syariah yang dikeluarkan hanya untuk perbankan syariah. Sementara, perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya juga memerlukan standar akuntansi keuangan syariah. Maka IAI melalui Dewan Standar Akuntansi

¹ Ahmad Fahrudin, *Akuntansi dan Ideologi, Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 9

Keuangan (DSAK) syariah telah merumuskan PSAK syariah. PSAK syariah ini merupakan perubahan dari PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Dimana PSAK syariah ini disahkan tahun 2007 dan berlaku tahun 2008, diantaranya: PSAK nomor 101 (penyajian laporan keuangan), PSAK nomor 102 (akuntansi *murabahah*), PSAK nomor 103 (akuntansi *salam*), PSAK nomor 104 (akuntansi *istishna*), PSAK nomor 105 (akuntansi *mudharabah*), dan PSAK nomor 106 (akuntansi *musyarakah*).²

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan bukan bank yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah yang bebas bunga adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis *Baitul maal wa tamwil* (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram.

Baitul Mal wa Tamwil merupakan bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil dan mikro yang merupakan segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia³ terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan daerah pedesaan. Kegiatan BMT diantaranya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan ekonomi.⁴

² Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, *The Indonesian Institute of Accountants*, 2011), hal. 18

³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2009) hal. 242

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana, 2012) hal. 364

Untuk mempertanggung jawabkan aktivitas yang telah dilakukan, pihak BMT perlu untuk membuat laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang berlaku umum untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, pengelolaan dan pemeriksaan dari transaksi finansial dalam suatu badan usaha yang dirancang untuk pembuatan keputusan baik dalam maupun luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.⁵

Salah satu tujuan laporan keuangan dari lembaga keuangan syariah adalah memberikan informasi yang lengkap kepada penggunaannya dan sebagai laporan pertanggungjawaban fungsi yang telah dilaksanakan oleh entitas syariah. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana *qardh*, pemilik dana investasi mudharabah, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infaq, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat.⁶

Penyajian laporan keuangan syariah yang mengacu pada PSAK No. 101 bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan entitas syariah lain. Dalam PSAK No. 101 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan.⁷

BMT Sakinah Masjid Baburrahim Batubasa merupakan salah satu lembaga keuangan syariah. Adapun dalam operasionalnya, BMT tersebut juga

⁵ Novi Priyati, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta : Permata Puri Media, 2013), hal. 5

⁶ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal.22

⁷ Wiroso, *Akuntansi Transaksi...*, hal. 50

memberikan pelayanan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana. BMT Sakinah memiliki beberapa produk penghimpunan dana diantara jenisnya adalah tabungan umum, tabungan pelajar, tabungan Qurban, tabungan wadiah, haji/umroh, tabungan walimah, tabungan Qardh, tabungan pertanian.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Nelia Hukmah selaku AO (Account Officer) dan pembukuan, dapat penulis ketahui untuk pertanggung jawabannya kepada masyarakat dan anggota, BMT Sakinah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat BMT Sakinah berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi.⁸ Adapun penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh pihak KJKS BMT pada tahun 2014-2015 sebagai berikut :

**Tabel 1.1NERACA
BMT SAKINAH MASJID BABURAHIM BATUBASA
PER 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015**

	2015	2014	Naik/Turun
AKTIVA			
Aktiva Lancar	241,834,500	122,468,000	119,366,500
1. Kas	31,632,500	40,736,000	(9,103,500)
2. Piutang Murabahah	209,280,800	81,732,000	127,548,800
3. Qard	921,300	-	
Aktiva Tetap	4,940,000	4,940,000	
4. Inventaris	17,745,000	13,245,000	4,500,000
5. Akumulasi Peny. Inventaris	(4,589,490)	(862,812)	3,726,678)
TOTAL AKTIVA	259,930,110	139,790,188	120,139,922

⁸Nelia Hukma ,informasi.....,21 April 2015

Pasiva Lancar	232,458,260	130,802,201	101,656,059
6. Tabungan Wadiah	57,011,507	13,156,115	43,855,392
7. Tabungan Mudharabah	175,416,753	117,646,086	57,770,667
8. Deposito			
9. Rupa- rupa Passiva			
10. Zakat Belum Disetor			
11. Pajak Belum Disetor			
Hutang Jangka Panjang			
12. Pemby.yang diterima			
Modal Sendiri	34,000,000	20,000,000	14,000,000
Rugi Tahun Lalu	6.528,150	11,012,013	(4,483,863)
Laba Tahun Lalu			
Laba Tahun Berjalan	6.528,150	(11,012,188)	(4,484,038)
Total Passiva	259,390,110	139,790,188	119,599,922

Sumber: Data BMT Sakinah

**Tabel 1.2 LAPORAN LABA RUGI
BMT SAKINAH MASJID BABURAHIM BATUBASA
PER 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015**

PERKIRAAN	Per 31 Des2015	Per 31 Des 2014
A. Pendapatan	0.00	0.00
Pendapatan jasa piutang	41,037,215,00	13,345,035.00
Pendapatan jasa bank	3,310,540.00	0.00
Pendapatan jasa lainnya	0.00	0.00
Pendaptan adminitrasi	7,403,000.00	4,321,000.00
Sub Total	51,750,755,00	17,866,035.00
JUMLAH PENDAPATAN	51,750,755,00	17,866,035.00

B. Pengeluaran	0.00	0.00
a. Beban Usaha	0.00	0.00
- Honor Karyawan	20,250,000.00	16,700,000.00
- THR	750,000.00	20,000.00
- Beban Lainnya	1,590,000.00	1,565,500.00
Sub Total	22,590,000.00	18,285,500.00
b. Beban ADM dan Umum	0.00	0.00
- Beban adminitrasi	8,000.00	170,000.00
- Beban Perlengkapan	3,541,074.00	3,356,916.00
- Beban alat tulis	1,877,000.00	304,000.00
Sub Total	5,426,074.00	3,830,916.00
c. Beban Organisasi	0.00	0.00
- Beban Pajak	0.00	0.00
- Beban Bunga	17.090.132.00	7,844,568.00
- Beban Lainnya	343,500.00	734,250.00
Sub Total	17,433,632.00	8,578,818.00
d. Beban Non Operasional	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00
Jumlah Biaya	45,449,706.00	30,695,234.00
E. Sisa Hasil Usaha	6,301,049.00	(12,829,199.00)
Sub Total	6,301,049.00	(12,829,199.00)
	6,301,049.00	(12,829,199.00)

Sumber: Data BMT Sakinah

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BMT Sakinah hanya berupa laporan neraca dan laporan laba rugi, sedangkan menurut PSAK No. 101 ada tujuh laporan keuangan yang harus dibuat, seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Dilihat pada laporan laba rugi terdapat pos

pendapatan jasa bank, sedangkan pada neraca tidak ada pos kas pada bank, tidak balance antara total aktiva dan total pasiva pada tahun 2015 dalam neraca. BMT Sakinah hanya membuat dua pos pada kewajiban yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, sedangkan menurut PSAK no.101 entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap kewajiban yang harus dibayarkan, seperti tabungan umum, tabungan pelajar, tabungan qurban, tabungan wadi'ah, tabungan angsuran. Pada laporan laba rugi nilai sisa hasil usaha (SHU) tidak sesuai dengan laba tahun berjalan pada laporan posisi keuangan (Neraca) tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyajian laporan keuangan pada BMT Sakinah.dengan judul **“PENERAPAN PSAK NOMOR 101 PADA BMT SAKINAH MASJID BABURRAHIM NAGARI BATUBASA KECAMATAN PARIANGAN ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Laporan keuangan BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan.
2. Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 101.
3. Penerapan PSAK Nomor 101 pada BMT Sakinah Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan.

C. BatasanMasalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Neraca pada BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan.
2. Laporan laba rugi pada BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah “Bagaimana penyajian laporan keuangan BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Paringan berdasarkan PSAK Nomor 101?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Penerapan laporan keuangan pada BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan berdasarkan PSAK NO. 101.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai salah satu persyaratan dalam tahap penyelesaian studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah konsentrasi Akuntansi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 - b. Menambah pemahaman dan pengetahuan penulis tentang penyajian laporan keuangan .
2. Bagi pihak Akademik, sebagai perkembangan ilmu pengetahuan akan bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya;
3. Bagi perusahaan atau pihak BMT, dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang khususnya dalam penyajian laporan keuangan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Akuntan adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan pencatatan, pengelolaan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktifitas hidupnya didunia.⁹

Akutansi islam atau akutansi syariah pada hakiketnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariat islam. Akutansi syariah ada dua fersi, akutansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai islami khususnya pada era Nabi SAW.¹⁰

2. Landasan Hukum Akuntansi Syariah

Pembahasan akutansi dalam Islam tidak mengada-ada dan tidak bersifat apologia, tetapi benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan sumber referensinya yang sah. Akutansi dalamislam dapat kita lihat melalui pedoman suci umat Islam.¹¹

Al-quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dari Al-quran sebagai berikut:

⁹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: 2011), hal. 2

¹⁰Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akutansi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persad, 2011), hal 56

¹¹Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akutansi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persad, 2011), hal 350

لِكَاتِبِينَكُمْ وَلِكُتُبًا كُتِبَوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 اللَّهُ وَلِيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمَلِّ فَلْيَكُتُبَ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكُتُبَانِ كَاتِبِيَابٍ وَلَا بِالْعَد
 ... شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبَّهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Firman Allah dalam Al-quran Surat Al-Syuraa ayat 182-183 sebagai berikut:

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتَوْ أَوْلَا أَشْيَاءَ هُمْ النَّاسِ تَبْخَسُوا وَلَا ۖ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطِ وَسِوَا


Artinya : Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Penggunaan sistem akuntansi jelas merupakan manivestasi dari pelaksanaan perintah itu karena sistem akuntansi dapat menjaga agar asset yang dikelola terjaga *accountability*nya sehingga tidak ada yang dirugikan, jujur, adil, dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya.

Fiman Allah dalam Al-quran Surat An-Nisa Ayat 58 sebagai berikut:

لَلَّهِ إِنْ بِهِ عَظْمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنْ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنْ
 بَصِيرًا سَمِعَ أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمَاتِنَا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Walau tidak secara spesifik menjelaskan tentang akuntansi, tapi ayat ini dapat dijadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 90 sebagai berikut:

وَالْبَغْيَ وَالْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءَ عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَاِتَّيَّ وَالْاِحْسَنَ بِالْعَدْلِ يَا مُرَّةَ اللّٰهِ اِنَّ
تَذَكَّرُوْنَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan. Sifat adil dan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Keadilan adalah asas dalam akuntansi syariah. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai posisinya. Sedang kebaikan dari keadilan adalah keadilan.

3. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah

Asumsi dasar yang dipergunakan dalam akuntansi syariah tidak beda dengan asumsi dasar pada akuntansi umum yaitu asumsi kelangsungan (*going concern*) dan dasar akrual (*accrual basis*).

a. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuiditas atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan

keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

b. Dasar Akrua

Dalam asumsi dasar akrua, aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching concept*) melibatkan secara bersamaan atau gabungan penghasilan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk harga pokok penjualan yang diakui pada saat yang sama dengan pengakuan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang yang bersangkutan.¹²

4. Prinsip Akuntansi Syariah

a. Prinsip Dasar Akuntansi

Prinsip adalah pendekatan umum yang dipakai dalam mengakui dan mengukur transaksi bisnis serta peristiwa ekonomi (peristiwa akuntansi). Ada empat prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, yaitu:

1) Prinsip Biaya Historis (*objektivitas*)

Prinsip biaya historis memiliki keterkaitan dengan beberapa asumsi dasar akuntansi, khususnya asumsi unit moneter dan kesinambungan usaha. Prinsip-prinsip yang berlaku umum mengharuskan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan

¹² Wiroso, *Akuntansi Transaksi*,... hal. 23

(biaya historis) memiliki keunggulan dibandingkan dengan atribut pengukuran lainnya, yaitu lebih dapat diandalkan.

2) Prinsip Pengakuan Pendapatan

Kerangka kerja konseptual FASB mengidentifikasi dua kriteria yang seharusnya yang dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan harus diakui, yaitu:

- a) Telah direalisasi atau dapat direalisasi.
- b) Telah dihasilkan/telah terjadi.

3) Prinsip Perbandingan

Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah *cash basis*, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi (*income statement*) dalam periode di mana uang kas diterima (untuk beban). Besarnya laba bersih (*net income*) atau rugi bersih (*net loss*) yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dengan beban, akan mencerminkan jumlah bersih uang kas yang dihasilkan (untuk *net income*) atau jumlah bersih uang kas yang dikeluarkan (untuk *net loss*).

Adapun dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah *accrual basis*, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode dimana pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memerhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar.

Dengan *accrual basis*, beban-beban yang terkait dengan penciptaan pendapatan haruslah dilaporkan dalam periode yang sama dimana pendapatan tersebut juga diakui. Konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dalam periode yang sama dinamakan sebagai konsep perbandingan (*matching concept*).¹³

¹³ Hery, *Teori,...* hal. 59-60

4) Prinsip Pengungkapan Penuh

Agar laporan keuangan menjadi lebih efektif, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal sebagai prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*).¹⁴

5. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah.¹⁵

1. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitra manusia. Dalam konteks akuntansi, menegaskan secara adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.

3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila

¹⁴ Hery, *Teori*,... hal. 62

¹⁵ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan*,... hal. 32-33

dilandaskan pada nilai kebenaran dan kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.¹⁶

B. PSAK Syariah (PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah)

1. Tujuan PSAK No. 101

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.¹⁷

2. Ruang Lingkup

Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau

¹⁶ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan*,... hal. 33

¹⁷ Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. (Jakarta, 2007) paragraf 8-9

prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.

Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangannya.

Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.¹⁸

3. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber - sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

¹⁸Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akutansi Keuangan*. (Jakarta, 2007) paragraf 2-7

- a. Asset
- b. Kewajiban
- c. Dana syirkah temporer
- d. Ekuitas
- e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- f. Arus kas
- g. Dana zakat; dan
- h. Dana kebajikan.

Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.¹⁹

C. Penyajian Laporan Keuangan PSAK 101

Pertimbangan menyeluruh dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah yaitu :

1. Penyajian Secara Wajar

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi

Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar

¹⁹Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2009), hal. 101.3

Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah
 - 2) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya
 - 3) Netral yaitu bebas dari keberpihakan
 - 4) Mencerminkan kehati-hatian
 - 5) Mencakup semua hal yang material
- c. Kelangsungan usaha

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (assessment) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan.

Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan

- d. Dasar Akrua

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil

usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

e. Konsisten penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode harus konsisten, kecuali:

- 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
- 2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

f. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

g. Saling Hapus (Offsetting)

Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan.

Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecuali mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yang dilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan, tidak termasuk kategori saling hapus.

h. Informasi Komparatif

Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya

diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.²⁰

Dalam PSAK No. 101 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan utama yang memberikan informasi tentang posisi keuangan pada suatu saat, menyajikan dua bagian pokok yaitu aktiva (*assets*) dan pasiva (*liabilities and capital*). Yang dimaksud dengan aktiva adalah jumlah harta/kekayaan yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasiva adalah jumlah kewajiban-kewajiban perusahaan atau sumber yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut.²¹

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah sebagai berikut :

a. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

²⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar...*, hal. 101.10

²¹ Lili M. Sadeli, *Dasar-Dasar...*, hal. 20

c. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

d. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer.²²

Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

1) Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah.
- b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
- c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

²² Wiroso, *Akuntansi Transaksi...*, hal. 50

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

2) Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

- a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah.
- b) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Neraca.

Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.²³

Informasi yang disajikan dalam neraca menurut PSAK No. 101 menyatakan bahwa neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Aset keuangan
- 3) Piutang usaha dan piutang lainnya
- 4) Persediaan
- 5) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
- 6) Aset tetap
- 7) Aset tak berwujud
- 8) Hutang usaha dan hutang lainnya
- 9) Hutang pajak
- 10) Dana syirkah temporer
- 11) Hak minoritas

²³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar...*, hal. 101.15

12) Modal saham dan pos ekuitas lainnya

Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam laporan posisi keuangan(neraca) dilakukan sebagai berikut :

- 1) Aktiva lancar. Disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya, artinya pos yang segera dapat dicairkan menjadi uang tunai disajikan di urutan paling atas.
- 2) Investasi. Investasi perusahaan pada perusahaan anak atau pada perusahaan afiliasi harus disajikan secara terpisah.
- 3) Aktiva tetap. Dapat dibedakan menjadi aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Pos-pos aktiva tetap disajikan dalam neraca menurut kekelannya. Aktiva tetap yang umurnya paling panjang disajikan paling atas, sedangkan aktiva tetap yang umurnya lebih pendek disajikan di bawahnya.
- 4) Aktiva lain-lain. Klasifikasi aktiva lain-lain digunakan untuk menampung pos-pos aktiva lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi di atas.
- 5) Kewajiban lancar. Pos-pos kewajiban lancar disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya. Utang lancar yang segera dibayar disajikan dalam urutan teratas.
- 6) Kewajiban jangka panjang. Penyajian kewajiban jangka panjang harus mengungkapkan ikatan-ikatan yang ada dalam kontrak utang jangka panjang yang bersangkutan, seperti tanggal jatuh tempo, aktiva yang dijadikan jaminan dan sebagainya.
- 7) Ekuitas. Ekuitas merupakan bagian hak milik dalam perusahaan, yaitu hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas disajikan dalam neraca berdasarkan kekelannya. Jenis modal yang sifatnya paling

kekal disajikan paling atas, dan yang kurang kekal disajikan di bawahnya.²⁴

2. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah dikeluarkan. Dari jumlah pendapatan dan biaya ini akan terdapat selisih, jika dikurangkan selisih dari jumlah pendapatan dan biaya ini disebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi laba (untung), namun jika sebaliknya, jika jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi rugi. Komponen lainnya yang ada dalam laporan laba rugi adalah pajak dan laba per lembar saham.²⁵

Menurut PSAK No. 101 menyatakan bahwa laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:

- a) Pendapatan usaha.
- b) Bagi hasil untuk pemilik dana.
- c) Beban usaha.
- d) Laba atau rugi usaha.
- e) Pendapatan dan beban nonusaha.
- f) Laba atau rugi dari aktivitas normal.
- g) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Jika terdapat pendapatan nonhalal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang

²⁴ Novi Priyati, *Pengantar...*, hal. 7

²⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen...*, hal.81

mengonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan nonhalal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.²⁶

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan dalam akuntansi yang menggambarkan bertambahnya atau berkurangnya modal suatu perusahaan akibat dari laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan tersebut dalam satu periode akuntansi. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- 1) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.
- 2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
- 3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.
- 4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
- 5) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.
- 6) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan

²⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar..., hal. 101.19

pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan.²⁷

4. Laporan Arus Kas

Dalam PSAK No. 101 menyatakan bahwa laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain. Adapun arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Laporan ini menggambarkan perputaran kas dan bank selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas terdiri atas sebagai berikut:

- 1) Sumber dan penggunaan kas dari atau untuk kegiatan operasional. Arus kas dari kegiatan operasional menunjukkan nilai kas bersih yang diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa perusahaan setelah dikurangi kas yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk atau jasa tertentu. Perubahan di dalam arus kas operasi biasanya memberikan tanda bahwa akan ada perubahan dalam laba bersih perusahaan di masa mendatang. Semakin tinggi peningkatan arus kas bersihnya, semakin bagus.
- 2) Sumber atau penggunaan kas dari atau kegiatan investasi. Sumber atau penggunaan kas dari kegiatan investasi menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang-barang ekuitas seperti peralatan baru, mobil, komputer, dan mesin baru. Kegiatan investasi juga mencakup

²⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar...*, hal. 101.21

akuisisi bisnis lainnya atau investasi dalam berbagai instrumen investasi, misalnya pembelian saham atau obligasi perusahaan lain untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan atau pada saat ini adalah kegiatan perusahaan memasukkan kas dalam reksadana.

- 3) Sumber dan penggunaan kas dari atau untuk kegiatan pendanaan. Arus kas dari kegiatan pendanaan menggambarkan pergerakan kas akibat adanya pendanaan atau pengambalian dana dari atau kepada pemegang saham atau calon pemegang saham atau dari pihak kreditur. Arus kas masuk dari kegiatan pendanaan biasanya terdiri dari hasil penjualan saham, obligasi, atau pinjaman bank. Sedangkan arus kas keluar pada kegiatan pendanaan adalah pembayaran angsuran hutang, pembayaran beban bunga, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembayaran deviden.²⁸

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan jika nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- 1) Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki)
 - a) Zakat dari dalam entitas syariah
 - b) Zakat dari pihak luar entitas syariah
- 2) Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
 - a) Fakir
 - b) Miskin
 - c) Riqab

²⁸ Thomas Sumarsan, *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*, (Jakarta :PT. Indeks, 2013), hal. 23

- d) Orang yang terlilit hutang (gharim)
 - e) Muallaf
 - f) Fiisabilillah
 - g) Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)
 - h) Amil
- 3) Kenaikan atau penurunan dana zakat.
 - 4) Saldo awal dana zakat.
 - 5) Saldo akhir dana zakat²⁹

Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah
- 2) Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah
- 3) Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf
- 4) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait.

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- 1) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - a) Infak
 - b) Sedekah
 - c) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
 - d) Pengembalian dana kebajikan produktif
 - e) Denda
 - f) Pendapatan nonhalal

²⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar...*, hal. 101.22

- 2) Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - a) Dana kebajikan produktif
 - b) Sumbangan
 - c) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
- 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
- 4) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan.
- 5) Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) Sumber dana kebajikan
- 2) Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima.
- 3) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- 4) Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuanganan memberikan perincian dari jumlah total aktiva tetap yang disajikan.

Perincian ini dalam bentuk penggolongan aktiva tetap berdasarkan nilai atau berdasarkan jenis-jenis aktiva tetap.

Catatan atas laporan keuangan juga digunakan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dilakukan seperti misalnya metode penyusutan apa yang digunakan dalam menghitung biaya depresiasi aktiva tetap, berapa estimasi usia pakai aktiva tadi, dan lain sebagainya. Khusus untuk pendapatan atau aktiva bersih, catatan atas laporan keuangan memberikan gambaran mengenai retriksi atau pembatasan apa saja yang dikenakan kepada aktiva bersih serta jenis-jenis pembatasannya termasuk jangka waktu bila ada.³⁰

1) Struktur

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.

³⁰ Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2007) , hal. 69

- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
- 2) Penyajian Kebijakan Akuntansi Bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a) Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan.
 - b) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.
- 3) Pengungkapan Lain
- Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:
- a) Domisili dan bentuk hukum entitas syariah, negara tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat.
 - b) Keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama entitas syariah.
 - c) Nama entitas syariah dalam grup, nama entitas syariah asosiasi, nama entitas syariah induk dan entitas syariah holding.
 - d) Nama anggota direksi dan komisaris.
 - e) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.³¹

³¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar...*, hal. 101.27

D. BMT (*Baitul mal wa Tamwil*)

1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul mal wa Tamwil*. Secara harfiah *lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyasarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

BMT memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut :

- a) *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.³²

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dalam bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat

³²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal.453

(anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

2. Tujuan dan Fungsi *Baitul Maal Wa Tamwil*

Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai:

- a. Penghimpun dan penyalur dana. Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan piutang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

3. Prinsip dan Produk Inti *Baitul Maal Wa Tamwil*

- a. Prinsip dan produk inti baitul maal

Baitul maal berprinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam arti bahwa *baitul maal* hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah-nya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan/pemungutan secara langsung kepada mereka-mereka

yang sudah memenuhi kewajibannya tersebut, dan seandainya aktif pun hanya bersifat seolah-olah meminta dan menghimbau, yang kemudian setelah itu *baitul maal* menyalurkannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.

Dari prinsip di atas dapat kita ungkapkan bahwa produk inti dari *baitul maal* terdiri atas :

1) Produk menghimpun dana

Dalam produk menghimpun dana ini, *baitul maal* menerima dan mencari dana berupa zakat, infak, dan sedekah. Selain sumber dana tersebut, *baitul maal* juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2) Produk penyaluran dana

Penyaluran dana-dana yang bersumberkan dari dana-dana *baitul maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an, yaitu kepada 8 (delapan) *asnaf* antara lain : *faqir, miskin, amilin, mu'alaf, fisabilillah, ghorimin, hamba sahaya, dan musafir*. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, mesjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

b. Prinsip dan produk inti baitul maal

Ada tiga prinsip yang dapat digunakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *baitul tamwil*), yaitu :

1) Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana

(penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.

2) Prinsip jual beli dengan *mark up*

Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah yang beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut *mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah murabahah dan *bai' bitsaman ajil*.

3) Prinsip *non profit*

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *qardul hasan*.³³

4. Sumber Dana *Baitul Maal Wal Tamwil*

Sumber dana BMT pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni :

a. Dana pihak pertama

Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan dalam :

³³Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang : UIN Malang Press,

1) Simpanan pokok khusus

Yaitu simpanan yang merupakan modal awal untuk mendirikan BMT. Jumlah tidak terbatas, terserah pada penyimpan akan menyimpan berapa menurut kemampuannya. Jumlah kepemilikan ini tidak memengaruhi hak suara dalam rapat.

2) Simpanan pokok

Merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di BMT, biasanya sama setiap anggota dan dapat diangsur. Anggota yang telah melunasi simpanan pokok ini dianggap sebagai anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya. Bagi yang belum lunas dicatat sebagai calon anggota.

3) Simpanan wajib

Merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota BMT sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Penetapan periode pembayaran dapat disesuaikan dengan kesanggupan anggota masing-masing.³⁴

b. Dana pihak kedua

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syariah.

³⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan*

Agama, (Jakarta : Kencana, 2011), hal.364

c. Dana pihak ketiga

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas.

5. *Sistem Bagi Hasil VS Sistem Bunga*

Sistem bunga sangat dikenal dalam ekonomi konvensional, untuk itu ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatannya. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian, kerugianpun ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak pihak yang tereksplotasi (dizholimi).

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba menyebabkan penciptaan uang dan tersedotnya uang disektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sekt riil.

Perbedaan mendasar antara Bunga dan Bagi Hasil yaitu sebagai berikut:

a. Bunga

- 1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan
- 2) Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana atau modal yang dipinjamkan
- 3) Bunga dapat mengambang , dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi
- 4) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi
- 5) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda

b. Bagi Hasil

- 1) Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
- 2) Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
- 3) Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama
- 4) Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
- 5) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.³⁵

6. Operasional Baitul Maal wat Tamwil(BMT)

Pada operasional kegiatannya, BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sektor riil dan swasta. Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain berupa penghimpun dana dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Dalam fungsi ini BMT disamakan dengan sistim perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat islam. Demikian pula instrumen yang dipakai untuk kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.³⁶

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Adapun jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:³⁷

³⁵Ascaria, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011). 26

³⁶ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 61

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.

a. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *mudharabah* dari anggota berbentuk:

- 1) Simpanan biasa.
- 2) Simpanan pendidikan.
- 3) Simpanan haji.
- 4) Simpanan umrah.
- 5) Simpanan qurban.
- 6) Simpanan Idul Fitri.
- 7) Simpanan walimah.
- 8) Simpanan akikah.
- 9) Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan).
- 10) Simpanan kunjungan wisata.

Simpanan *mudharabah* berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan).

b. Pembiayaan *mudharabah* Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:³⁸

- 1) yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
- 2) Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
- 3) Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
- 4) Pembiayaan *bay" bi saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
- 5) Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*,... hal.464

Pada operasional kegiatannya, BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sektor riil dan swasta. Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain berupa penghimpun dana dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Dalam fungsi ini BMT disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Demikian pula instrumen yang dipakai untuk kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

E. Penelitian Relevan

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis kemukakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya mengenai bisnis keuangan syariah dan laporan keuangan, yaitu:

1. Siti Sholihah (2009)

Penelitian Siti Sholihah dengan judul analisis penerapan PSAK 101-106 dalam Akuntansi, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan hasil penelitian penerapan PSAK No 101-106 belum semuanya diterapkan. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan yaitu DPS yang kurang fokus terhadap kinerjanya dan SDM yang kurang memahami peraturan PSAK tersebut. Pada PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan, KJKS An Nisa Kab. Pemalang hanya menerapkan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan laporan sumber dan penggunaan dana *qordhul hasan*.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sholihah berbeda dengan yang akan penulis teliti, dimana Siti Sholihah meneliti tentang penerapan PSAK 101-106 sementara peneliti hanya akan meneliti tentang penerapan PSAK 101 saja pada KJKS BMT tersebut.

2. Nozalina (2015)

Penelitian Nozalina dengan judul analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 101 pada KJKS BMT Agam madani nagari kamang hilia, jurusan akutansi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar. Dengan hasil penelitian penyajian laporan keuangan KJKS BMT Agam Madani belum sesuai dengan PSAK No. 101. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan laporan posisi keuangan yang dibuat oleh pihak KJKS BMT Agam Madani, dimana pihak BMT tidak melakukan pemisahan antara aset lancar dengan aset tidak lancar. Sedangkan dalam PSAK No. 101 aset lancar dan aset tidak lancar dipisahkan. Sehingga ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menyusun laporan posisi keuangan agar sesuai dengan PSAK No. 101. Begitupun dalam penyusunan laporan laba rugi, dimana pihak BMT menyatukan pendapatan operasional dengan pendapatan non operasional dan beban operasional disatukan dengan beban non operasional. Sedangkan dalam PSAK No. 101 pendapatan dan beban operasional dipisahkan dari pendapatan dan beban non operasional agar diketahui laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan utama BMT.

Penelitian yang dibuat oleh Nozalina mungkin akan ada sedikit kesamaan dengan yang akan penulis teliti, yaitu pada penyempurnaan laporan keuangan yang telah dibuat oleh KJKS BMT yang akan disesuaikan dengan PSAK 101. Akan tetapi perbedaannya Nozalina menganalisis laporan keuangan tersebut sesuai PSAK 101, itu berarti tempat penelitian Nozalina sudah menerapkan PSAK No.101 sehingga bisa untuk di analisis. Namun peneliti disini akan menerapkan PSAK 101 dengan membuat keseluruhan komponen laporan keuangan yang ada pada PSAK 101 tersebut.

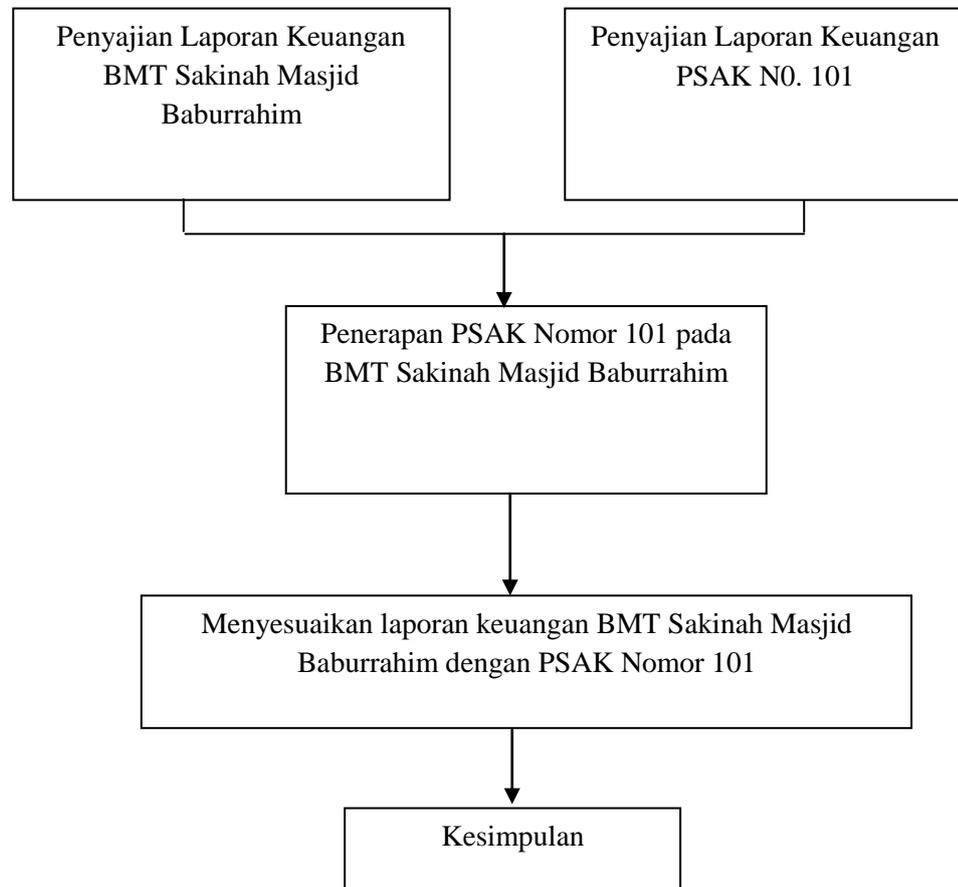
3. Hanna Rahmanida (2015)

Penelitian Hanna Rahmanida dengan judul penerapan PSAK No.101 pada penyusunan laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Dengan hasil penelitian bahwa prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum pada BSM terdiri atas dua tahap. Pertama, Pembuatan laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan berbasis XBRL yang merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Kedua, pembuatan laporan secara manual dalam bentuk *excel* yang digunakan sebagai alat kontrol LSMK. BSM juga telah menerapkan PSAK No.101 dengan baik khususnya pada laporan dana zakat dan dana kebajikan.

Penelitian yang dibuat oleh Hanna Rahmanida berbeda dengan yang penulis teliti. Hanna Rahmanida hanya membuat laporan dana zakat dan dana kebajikan yang sesuai dengan PSAK No.101 sementara penulis ketujuh komponen laporan keuangan yang tertera pada PSAK No.101 yaitu : laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Hanna Rahmanida juga membuat laporan dalam bentuk lain, tidak hanya berpartokan kepada PSAK 101 saja.

F. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BMT Sakinah Masjid Baburrahim Batubasa dan menyesuaikannya dengan penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Karena laporan keuangan yang dibuat oleh BMT Sakinah Masjid Baburrahim Batubasa belum berdasarkan PSAK No. 101 maka laporan keuangan tersebut akan disesuaikan dengan PSAK tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis melakukan penelitian pada BMT sakinah masjid baburahin Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan dengan cara menganalisis laporan keuangan BMT Sakinah, apakah sesuai dengan laporan keuangan yang berdasarkan PSAK No.101

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis telah melakukan penelitian ini dimulai pada bulan November 2016 sampai Januari 2017. Tempat penulis meneliti adalah di BMT Sakinah Baburrahim Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan.

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi yakni berupa laporan keuangan BMT Sakinah Baburrahim Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, disusun, dan dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang penyajian laporan keuangan pada BMT Sakinah sebagai salah satu lembaga keuangan

yang kegiatannya berprinsip syariah berdasarkan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Analisis data ini didasarkan pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan.

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Menganalisis Neraca BMT Sakinah Masjid Baburrahin Batubasa dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan neraca yang disusun oleh BMT dengan neraca menurut PSAK No. 101.
 - 2) Menganalisis apakah neraca yang dibuat oleh BMT sudah sesuai dengan neraca yang diatur PSAK No. 101.
 - 3) Jika neraca yang dibuat oleh BMT belum sesuai dengan PSAK No. 101 maka penulis menyesuaikan penyusunan neraca agar sesuai dengan PSAK No. 101.
- b. Menganalisis Laporan laba rugi BMT Sakinah Masjid Baburrahim Batubasa dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan laporan laba rugi yang disusun oleh BMT dengan laporan laba rugi menurut PSAK No. 101.
 - 2) Menganalisis apakah laporan laba rugi yang dibuat oleh BMT sudah sesuai dengan laporan laba rugi yang diatur PSAK No. 101.
 - 3) Jika laporan laba rugi yang dibuat oleh BMT belum sesuai dengan PSAK No. 101, maka penulis menyesuaikan penyusunan laba rugi agar sesuai dengan PSAK No. 101.
- c. Penulis menyusun Laporan Keuangan yang tidak dibuat oleh BMT agar sesuai dengan PSAK No. 101, laporan yang akan disusun sebagai berikut:
 - 1) Laporan perubahan ekuitas
 - 2) Laporan arus kas
 - 3) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
 - 4) Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan
 - 5) Catatan atas laporan keuangan

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa

1. Sejarah Pendirian BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa

BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa secara resmi berdiri pada tanggal 21 Januari 2014, dengan nama KJKS BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa dengan modal awal Dua puluh juta rupiah. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintahan Kenagarian, tokoh masyarakat serta pengusaha swasta di kecamatan pariangan atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank mikro, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di daerah.

Adapun pilar utama BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa adalah:

- a. Manajemen dan karyawan.
- b. Nasabah.
- c. Pemegang saham.

Daftar pemegang saham BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa. Anggota pendiri saham yaitu:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1) Dana lem (lembaga ekonomi masjid | 12) Taufik |
| 2) Aqilah | 13) Nailis Sa'ada |
| 3) Bakhrizal Pakiah Sulaiman | 14) Kasnida |
| 4) H.j Darmaiyah | 15) Hafizah |
| 5) Eliyarti | 16) Drs. Akhiyar, MM |
| 6) Miftah Novi | 17) Dian Reflinda |
| 7) Basmir Pakiah Sutan | 18) Hj. Azwarti |
| 8) Zulfa Indra | 19) Anak Yatim |
| 9) Ridwan Jasa | 20) Hj. Nurni |
| | 21) Rasul Karim |
| | 22) Halimah Tusadyah |

10) Dadratul Wahida

11) Nelia Hukma

Adapun *core value* BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa adalah:

- a. Komitmen.
- b. Integritas.
- c. Loyalitas.

Maksud dan Tujuan Pendirian BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa adalah :

“BMT didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan Nagari dan masjid dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat dengan melalui Masjid.”

Dengan demikian tugas dan fungsi BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa adalah :

- a. Penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
- b. Sebagai pemegang kas Masjid.
- c. Salah satu sumber Pendapatan Pemberdayaan Ekonomi Masjid.

Selanjutnya maksud dan tujuan pendirian BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa adalah untuk :

- a. Mengembangkan pertumbuhan ekonomi Masyarakat dalam rangka mempertinggi taraf hidup masyarakat untuk menjadi lebih baik dan produktif.
- b. Mengelola Keuangan Masjid dan anak yatim dan digunakan Untuk Membantu masyarakat.

2. Visi dan Misi BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa

a. Visi

Menjadi BMT terkemuka dan terpercaya berbasis Ekonomi Masjid.

b. Misi

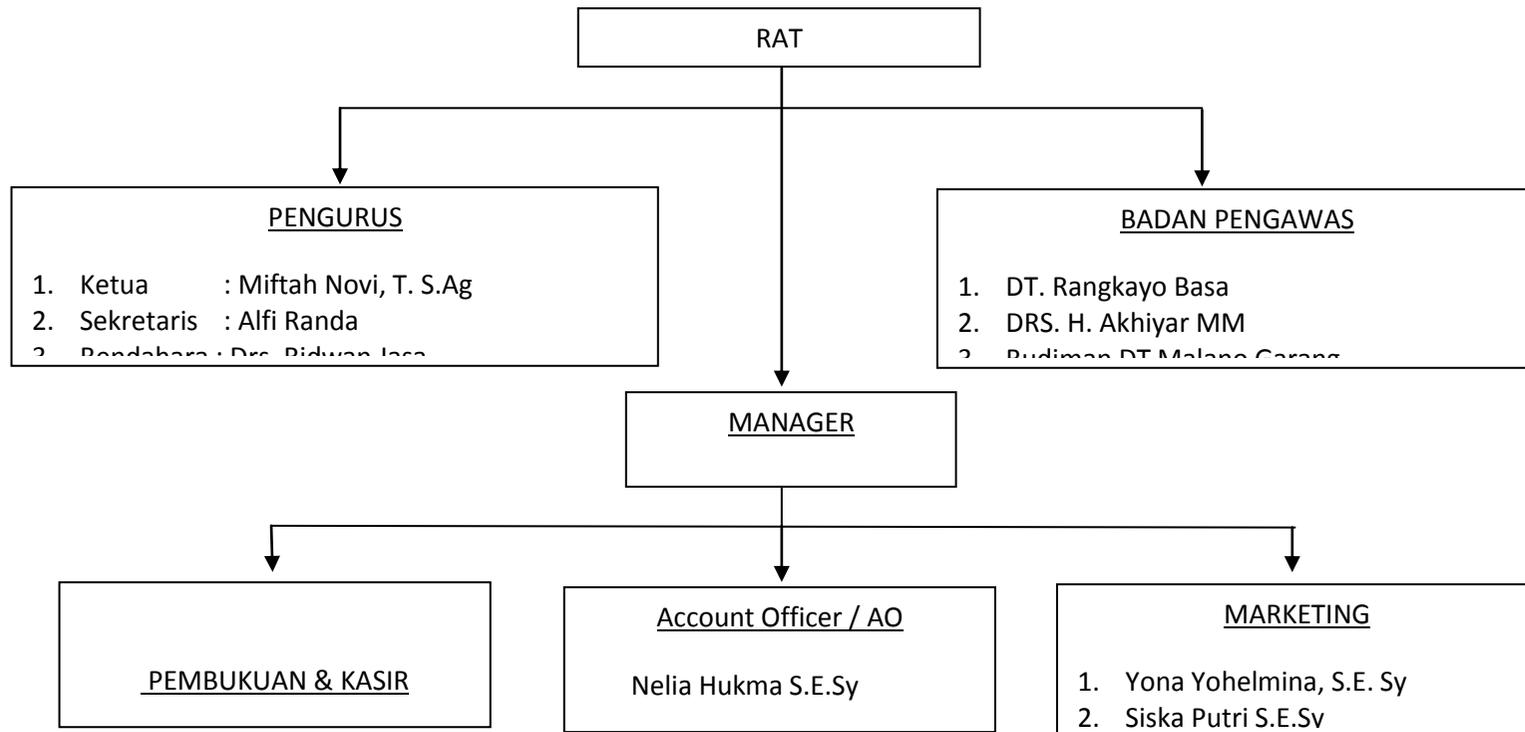
- 1) Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya BMT, turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi Masjid.
- 2) Memenuhi dan menjaga kepentingan *stakeholder* secara konsisten dan seimbang. BMT akan senantiasa menjalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.
- 3) Menjaga agar BMT ini bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat sesuai syariah.
- 4) Memberikan pelayanan yang prima.
- 5) Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham.
- 6) Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. Struktur Organisasi BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa

STRUKTUR ORGANISASI

KJKS BMT SAKINAH MASJID BABURRAHIM BATUBASA

PERIODE : 2014 / 2017



Gambar 4.1

Keterangan:

a. Manager

Manager adalah pejabat struktural yang ditetapkan pengurus untuk memimpin BMT dalam melaksanakan bisnis dan operasional BMT di wilayah kerja BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa. Kegiatan bisnis BMT Mencakup Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan penyaluran jasa perbankan lainnya.

Tugasnya :

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengurus kepada manager untuk dilaksanakan di wilayah kerja BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa
- 2) Memimpin BMT dalam melaksanakan operasional BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa.
- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam operasional BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa.
- 4) Memberikan arahan, dorongan dan motivasi kepada karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas secara efektif, efisien ekonomis, lancar, aman dan tertib.
- 5) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan dan informasi - informasi baru yang diperoleh dari berbagai sumber.

b. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah petugas pelaksanaan yang bertanggung jawab langsung kepada manajer dalam melaksanakan tugas-tugas, dan tanggung jawabnya di BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa .

Tugasnya:

- 1) Mempersiapkan rekomendasi atau appraisal atas permohonan seluruh pembiayaan yang diajukan masyarakat atau nasabah kepada BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa.

- 2) Mempersiapkan rekomendasi atau appraisal atas perpanjangan atau restrukturisasi seluruh pembiayaan yang diajukan masyarakat atau nasabah kepada BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa.
- 3) Mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan penarikan atau penukaran sebagai agunan pembiayaan, pemberian keringan kewajiban, penghapus bukuan pembiayaan macet, hapus tagih pembiayaan dan lain sejenisnya di BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa.
- 4) Melakukan taksasi atas agunan pembiayaan bersama-sama dengan petugas yang ditetapkan oleh Pengurus.
- 5) bertindak sebagai sponsor atas rekomendasi seluruh pembiayaan yang diajukan masyarakat atau nasabah kepada BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa.
- 6) Mempersiapkan data dan analisis yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja pembiayaan BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa.

Adapun Produk- Produk BMT SAKINAH Masjid Baburrahim Batubasa.

- 1) Produk Penghimpun Dana (*Funding*)
 - a) Tabungan Umum
 - b) Tabungan pelajar
 - c) Tabungan qurban
 - d) Tabungan wadiah
 - e) Tabungan haji/umrah
 - f) Tabungan pertanian
- 2) Produk Penyaluran Dana dalam bentuk pembiayaan
 - a) *Murabahah* Modal Kerja

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* yang

diberikan untuk modal kerja, properti, agrobisnis dan usaha lainnya.

b) *Murabahah* Investasi

Pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah di berbagai sektor ekonomi produktif.

1) Pembiayaan Kepada Koperasi

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dalam bentuk akad *mudharabah* dengan memakai prinsip bagi hasil.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk pembuatan keputusan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha suatu lembaga keuangan syariah. Salah satu tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang lengkap kepada penggunanya dalam pengambilan keputusan dan sebagai laporan pertanggungjawaban fungsi yang telah dilaksanakan oleh lembaga keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh BMT Sakinah tempat penulis melakukan penelitian yaitu berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Berdasarkan data yang penulis peroleh kedua laporan keuangan tersebut belum memenuhi kriteria yang tercantum dalam PSAK No.101 yang mengatur tentang laporan keuangan untuk entitas syariah. Dalam PSAK No. 101 tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap untuk entitas itu terdiri dari tujuh komponen laporan keuangan yakni :

1. Laporan posisi keuangan (sudah dibuat oleh BMT Sakinah)
2. Laporan laba rugi (sudah dibuat oleh BMT Sakinah)
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam satu periode tertentu agar perusahaan dapat mengetahui jumlah pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode. Jadi, BMT Sakinah dalam membuat laporan laba rugi harus memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat pos-pos yang tertera pada laporan laba rugi BMT Sakinah sebagai berikut :

1. Pendapatan Operasional
 - a) Jasa Piutang
 - b) Jasa Bank
 - c) Pendapatan Lainnya
2. Beban-baban
 - a) Beban Usaha
 - 1) Honor Karyawan
 - 2) THR
 - 3) Beban Lainnya
 - b) Beban ADM dan Umum
 - 1) Beban Adminitrasi
 - 2) Beban Perlengkapan
 - 3) Beban Alat Tulis
 - c) Beban Organisasi
 - 1) Beban Bunga
 - 2) Beban Lainnya

Penyajian laporan laba rugi entitas syariah menurut PSAK No.101 disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Pada laporan laba rugi BMT Sakinah terdapat pos jasa piutang sedangkan pada PSAK No.101 pos tersebut bernama pendapatan margin murabahah. Beban

usaha pada BMT Sakinah dibagi menjadi 3 yaitu beban usaha, beban ADM dan Umum dan beban organisasi, sedangkan menurut PSAK No.101 beban usaha dibagi menjadi 4 yaitu beban kepegawaian, beban administrasi, beban penyusutan dan amortisasi, beban usaha lain. Laporan laba rugi minimal mencakup :

- a) Pendapatan usaha
- b) Bagi hasil untuk pemilik dana
- c) Beban usaha
- d) Laba atau rugi usaha
- e) Pendapatan dan beban non usaha
- f) Laba atau rugi dari aktifitas normal
- g) Laba atau rugi bersih periode berjalan.

Dari penjelasan diatas maka laporan laba rugi untuk BMT Sakinah yang sesuai dengan PSAK No.101 adalah seperti tabel berikut :

TABEL 4.1
BMT SAKINAH BATUBASA
LAPORAN LABA/RUGI
PER 31 DESEMBER 2014/31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah)

PERKIRAAN	2015	2014
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA		
Pendapatan Margin Murabahah	44.347.755	13.545.035
Pendapatan Adminitrasi	7.403.000	4.321.000

Jumlah Pendapatan Pengelola Dana	51.750.755	17.866.035
Jumlah Pendapatan	51.750.755	17.866.035

BEBAN USAHA		
Beban Kepegawaian		
Honor Karyawan	20.250.000	16.700.000
THR	750.000	20.000
Beban Lainnya	1.590.000	1.565.500
Jumlah Beban Kepegawaian	22.590.000	18.285.500
Beban ADM dan Umum		
Beban Administrasi	8.000	170.000
Beban Perlengkapan	3.541.074	3.356.916
Beban Alat Tulis	1.877.000	304.000
Jumlah Beban ADM	5.426.074	3.830.916
Beban Usaha Lain	17.433.632	8.587.818
Jumlah Beban Usaha	45.449.706	30.704.234
Laba (Rugi) Usaha	6.301.049	(12.829.199)

Sumber: data yang diolah

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan dalam akuntansi yang menggambarkan bertambahnya atau berkurangnya modal suatu perusahaan akibat dari laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan

tersebut selama periode akuntansi. Jadi, dengan adanya laporan perubahan ekuitas BMT Sakinah dapat mengetahui perubahan ekuitas yang menggambarkan bertambah atau berkurangnya modal BMT selama satu periode.

Dalam PSAK No.101 penyajian laporan perubahan ekuitas harus menyajikan komponen utama laporan keuangan yang menonjolkan adanya laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan, semua pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya. Kemudian juga pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi, Transaksi modal dan pemilik, serta rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal.

Laporan perubahan ekuitas yang bisa dibuat oleh BMT Sakinah agar sesuai dengan PSAK No.101 dapat disusun dengan cara :

- a. Menggambarkan saldo awal tahun seluruh ekuitas yang dimiliki oleh BMT, yaitu berupa modal sendiri.
- b. Laba atau rugi yang terjadi pada periode yang bersangkutan
- c. Menggambarkan saldo akhir tahun seluruh ekuitas setelah disesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun tersebut.

Bentuk laporan perubahan ekuitas yang bisa dibuat oleh pihak BMT Sakinah yang sesuai dengan PSAK No.101 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2
BMT SAKINAH BATUBASA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2014/31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah)

PERKIRAAN	2015	2014
Saldo awal modal	34.000.000	20.000.000
Penambahan/pengurangan	(12.829.199)	-
Laba/rugi tahun berjalan	6.301.049	(12.829.199)
Saldo Akhir 31 des	27.471.850	7.170.801

Sumber: data yang diolah

3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada saat periode tertentu. Laporan posisi keuangan ini menyajikan dua bagian yakni bagian aktiva (jumlah harta yang dimiliki perusahaan) dan bagian pasiva (jumlah kewajiban yang digunakan untuk memperoleh aktiva).

Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT Sakinah mengenai laporan posisi keuangan bahwa BMT Sakinah telah menyajikan dua bagian pada laporan posisi keuangannya yaitu bagian aktiva dan bagian pasiva, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Aktiva

Aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki BMT, adapun susunan akun-akun yang terdapat pada bagian aktiva BMT Sakinah adalah sebagai berikut :

- a) Kas
- b) Kas di Bank
- c) Piutang murabahah
- d) Sewa dibayar dimuka
- e) Inventaris
- f) Akumulasi penyusutan inventaris

2) Pasiva

Pasiva merupakan kewajiban dan modal yang dimiliki oleh BMT Sakinah, dalam bagian pasiva BMT Sakinah terdapat kewajiban dan ekuitas. Akun-akunnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Kewajiban

Kewajiban pada pasiva BMT Sakinah terdiri dari :

- 1. Tabungan Wadiah
- 2. Tabungan Mudharabah

b) Ekuitas

Modal yang terdapat pada pasiva BMT Sakinah adalah dari modal sendiri.

Dari pos-pos laporan posisi keuangan yang dibuat oleh pihak BMT Sakinah masih terdapat penempatan pos-pos laporan tersebut yang belum memenuhi kriteria pada PSAK no.101, seperti inventaris pada aktiva belum terperinci satu persatu, misalnya seperti komputer kendaraan, dan inventaris lainnya. BMT Sakinah hanya membuat dua pos pada kewajiban yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, sedangkan menurut PSAK no.101 entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap kewajiban yang harus dibayarkan, seperti tabungan umum, tabungan pelajar, tabungan qurban, tabungan wadi'ah, tabungan angsuran.

Adapun informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan menurut PSAK No.101 yakni berupa :

1. Kas dan setara kas
2. Aset keuangan
3. Piutang usaha dan piutang lainnya
4. Persediaan
5. Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
6. Aset tetap
7. Aset tak berwujud
8. Hutang usaha dan hutang lainnya
9. Hutang pajak
10. Dana syirkah temporer
11. Hak minoritas
12. Modal saham, serta pos-pos lainnya.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas pihak BMT Sakinah dalam penyesuaian laporan posisi keuangan yang telah dibuat oleh pihak BMT dengan PSAK No.101 perlu melakukan beberapa perubahan (penyesuain), seperti format dan penempatan pos-pos laporan tersebut. Sehingga laporan posisi keuangan untuk BMT Sakinah berdasarkan PSAK No. 101 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.3
BMT SAKINAH BATUBASA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014/31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah)

PERKIRAAN	2015	2014
ASET		
Aset Lancar		
Kas	31.632.500	40.736.000
Pitang Murabahah	209.280.800	81.732.000
Qard	921.300	-
Jumlah Aset Lancar	241.834.600	122.468.000
Asset Tidak Lancar		
Komputer	5.185.000	5.185.000
Printer	560.000	560.000
Software	7.500.000	7.500.000
Meja Kasir	1.500.000	-
Meja Kerja	1.500.000	-
Lemari Arsip	1.500.000	-
Jumlah Tidak Lacar	17.745.000	13.245.000

Asset Tetap Lainnya	4.940.000	4.940.000
Akumulasi Peny.Inventaris	(4.589.490)	(1.150.416)
JUMLAH ASSET	259.930.110	139.502.584
KEWAJIBAN		
Tabungan Umum	144.568.102	87.559.932
Tabungan Pelajar	30.848.651	31.615.745
Tabungan Qurban	30.000	430.000
Tabungan Wadia'ah	26.111.847	634.000
Tabungan Angsuran	30.899.660	12.092.115
JUMLAH KEWAJIBAN	232.458.260	132.331.783
EKUITAS		
Modal Disetor	34.000.000	20.000.000
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(12.829.199)	-
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.301.049	(12.829.199)
JUMLAH EKUITAS	27.471.850	7.170801
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	259.930.110	139.502.584

Sumber: data yang diolah

4. Laporan Arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan dan pinjaman dari pihak lain, sedangkan kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Jadi, dengan adanya laporan arus kas BMT Sakinah bisa mengetahui arus kas masuk dan arus kas keuar yang terjadi dalam perusahaan seama periode tertentu.

Informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan arus kas umumnya diperoleh dari neraca komparatif, laporan laba rugi dan informasi pendukung lainnya. Untuk itu, dalam penyusunan laporan arus kas BMT Sakinah harus mengklasifikasikan arus kas pada tiga bagian aktifitas :

a. Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan. Pada umumnya arus kas aktivitas operasi berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba/rugi bersih.

b. Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menggambarkan pergerakan kas akibat adanya pendanaan atau pengambilan dana oleh pemilik modal.

Dari uraikan diatas, laporan arus kas yang bisa dibuat oleh BMT Sakinah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.4
BMT SAKINAH BATUBASA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2015
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	
Tabungan Umum	144.568.102
Tabungan Pelajar	30.848.651
Tabungan Qurban	30.000
Tabungan Wadia'ah	26.111.847
Tabungan Angsuran	30.899.660
Pendapatan Margin Murabahah	44.347.755
Pendapatan Administrasi	7.403.000
Piutang Murabahah	(209.280.800)
Qard	(921.300)
Beban Kepegawaian	(22.590.000)
Beban Administrasi	(5.426.074)
Beban Usaha Lain	(17.433.632)
Total Kas Dari Aktivitas Operasi	28.557.209

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian Aset Tetap	(4.500.000)
Total Kas Dari Aktivitas Investasi	(4.500.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Modal	14.000.000
Laba Tahun Berjalan	6.301.049
Rugi Tahun 2014	(12.829.199)
Total Kas Dari Aktivitas Pendanaan	7.471.850
KENAIKKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	40.736.000
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	31.632.500

Sumber: Data Yang Diolah

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan dana zakat berasal dari wajib zakat dan penggunaan zakat melalui badan amil zakat, sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan dana zakat serta saldo awal dan saldo akhir dana zakat.

Jadi, dengan adanya laporan sumber dan penggunaan dana zakat BMT Sakinah bisa mengetahui berapa jumlah zakat yang terkumpul dan berapa jumlah zakat yang akan dibagikan kepada asnaf yang delapan, yakni orang-orang fakir, miskin, riqab, gharim, muaf, fissanillah, ibnu sabil, dan amil zakat.

BMT Sakinah belum membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan juga keterbatasan dalam memperoleh data, hal ini menyebabkan tidak dapat dikathui berapa kenaikan atau penurunan saldo dana zakat, dan berapa saldo awal dan saldo akhir dana zakat dalam satu periode tertentu.

Adapun ketentuan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat menurut PSAK No.101 dapat disusun dengan cara berikut :

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzaki)
 - a. Zakat dari dalam entitas syariah
 - b. Zakat dari pihak luar entitas syariah
2. Penggunaan dana zakat melalui badan amil zakat untuk :
 - a. Fakir
 - b. Miskin
 - c. Riqab
 - d. Gharim
 - e. Fisabilillah
 - f. Mualaf
 - g. Ibnu sabil
 - h. Amil zakat.³⁹

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, dimana dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini memberikan informasi mengenai sumber dana kebajikan dan penggunaan dana kebajikan. Jadi, dengan adanya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan BMT Sakinah bisa mengetahui sumber dana kebajikan dan juga mengetahui dana kebajikan.

Namun disini BMT Sakinah belum membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan karena keterbatasan dalam memperoleh data.

³⁹Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar...*, hal. 101.21

hal ini menyebabkan tidak diketahuinya berapa jumlah dana kebajikan yang terkumpul dan berapa jumlah dana kebajikan yang disalurkan dalam satu periode tertentu.

Adapun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang bisa dibuat oleh BMT Sakinah berdasarkan PSAK No. 101 adalah sebagai berikut :

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan :
 - a. Infak
 - b. Sedekah
 - c. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Pengembalian dana kebajikan produktif
 - e. Denda
 - f. Pendapatan non halal
2. Penggunaan dana kebajikan
 - a. Dana kebajikan produktif
 - b. Sumbangan
 - c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
4. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan
5. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan⁴⁰

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan keuangan lainnya yang bertujuan untuk memberikan tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan tersebut berfungsi untuk memperjelas akun-akun yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan

⁴⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar...*, hal. 101.23

sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan dan sumber dana kebajikan.

Menurut PSAK No. 101 catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut :

1. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
2. Informasi pendukung laporan-laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
3. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan BMT Sakinah belum sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini dapat dilihat dari :

1. BMT Sakinah hanya membuat dua jenis laporan keuangan, sedangkan menurut PSAK No.101 ada tujuh jenis laporan keuangan. Dari tujuh jenis laporan keuangan berdasar PSAK No.101 hanya empat jenis laporan keuangan yang bisa diterapkan pada BMT Sakinah, dikarenakan tidak adanya data.
2. Penyajian laporan posisi keuangan yang dibuat oleh pihak BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan, dimana pihak BMT tidak melakukan pemisahan aset tetap (inventaris). Sedangkan dalam PSAK No. 101 aset tetap dipisahkan. Seperti, komputer, printer, dan software. Sehingga ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menyusun laporan posisi keuangan agar sesuai dengan PSAK No. 101.
3. Penyajian laporan laba rugi, dimana nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibuat oleh pihak BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan, tidak sesuai dengan laba tahun berjalan pada laporan posisi keuangan (neraca) tahun 2014.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka peneliti mengemukakan saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan

BMT Sakinah, yaitu mengingat bahwa BMT Sakinah merupakan BMT yang seluruh aktivitasnya berdasarkan pada prinsip syariah, maka diharapkan dapat membuat laporan keuangan yang sesuai PSAK No. 101 terhadap penyajian laporan keuangan syariah untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode.

Kemudian dalam penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, pihak BMT dapat menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai dengan PSAK No. 101 supaya sesuai dengan PSAK. Dan menyusun laporan keuangan yang belum dibuat oleh pihak BMT agar sesuai dengan PSAK No. 101 yaitu laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana, 2012)
- , *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Ahmad Fahrudin, *Akuntansi dan Ideologi, Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Ascaria, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2009)
- Hanna Rahmanida, ”Penerapan PSAK No.101 pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri” , (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2009)
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*.(Jakarta, 2007)
- Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang : UIN Malang Press, 2009)
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Novi Priyati, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta : Permata Puri Media, 2013)
- Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*,(Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2007)
- Siti Sholihah, “Analisis Penerapan PSAK No.101-106 dalam Akuntansi Syariah” ,(Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri WaliSongo Semarang)
- Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persad, 2011)
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta, 2011)
- Thomas Sumarsan, *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*, (Jakarta :PT. Indeks, 2013)

Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, *The Indonesian Institute of Accountants*, 2011)

NERACA
BMT SAKINAH
MASJID BABURRAHIM BATUBASA
PER 31 DES 2014 DAN 31 DESEMBER 2015

	Des-15	Des-14	Naik / Turun	%
AKTIVA				
Aktiva Lancar	Rp. 241,834,500	Rp. 122,468,000	Rp. 119,366,500	49.35
1. Kas	Rp. 31,632,500	Rp. 40,736,000	(Rp. 9,103,500)	28.77
2. Piutang Murabahah	Rp. 209,280,800	Rp. 81,732,000	Rp.127,548,800	60.94
3. Qard	Rp. 921,300	-		
Aktiva Tetap	Rp. 4,940,000	Rp. 4,940,000		
4. Inventaris	Rp. 17,745,000	Rp. 13,245,000	Rp. 4,500,000	25.35
5. Akumulasi Peny. Inventaris	(Rp. 4,589,490)	(Rp. 862,812)	(Rp. 3,726,678)	81.20
TOTAL AKTIVA	Rp. 259,930,110	Rp.139,790,188	Rp.120,139,922	46.22
PASSIVA				
Passiva Lancar	Rp.232,458,260	Rp.130,802,201	Rp.101,656,059	43.73
6. Tabungan Wadi'ah	Rp. 57,011,507	Rp. 13,156,115	Rp. 43,855,392	76.92
7. Tabungan Mudharabah	Rp.175,416,753	Rp.117,646,086	Rp. 57,770,667	32.93
8. Deposito				
9. Rupa - rupa Passiva				
10. Zakat belum disetor				
11. Pajak belum disetor				
Hutang Jangka Panjang				
12. Pemby. Yang diterima				
Modal Sendiri	Rp. 34,000,000	Rp. 20,000,000	Rp. 14,000,000	41.17
Rugi tahun lalu	Rp. 6,528,150	Rp. 11,012,013	(Rp. 4,483,863)	68.68
Laba tahun lalu				
Laba tahun berjalan	Rp. 6,528,150	Rp. 11,012,188	(Rp. 4,484,038)	68.68
TOTAL PASSIVA	Rp.259,390,110	Rp.139,790,188	Rp.119,599,922	46.10

Kenaikan Asset Tahun 2015 Sebesar 46.10% disebabkan kenaikan modal atau simpanan sukarela sebesar ± Rp.43.855.392,- dan kenaikan tabungan masyarakat ± sebesar Rp.57.770.667,-

Batusangkar, 31 Desember 2015

Ketua

Miftah Nofi T.S.Aq

Bendahara

Ridwa Jasa

Sekretaris

Alfi Randa

SANDI	PERKIRAAN	SALDO AWAL HARI	MUTASI		SALDO AKHIR
			DEBET	KREDIT	
100	A. PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
112	i. Pendapatan Jasa Piutang	13,462,485.00	0.00	82,550.00	13,545,035.00
113	ii. Pendapatan Jasa Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
114	iii. Pendapatan Jasa Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
115	iv. Pendapatan Administrasi	4,321,000.00	0.00	0.00	4,321,000.00
	Sub Total	17,783,485.00	0.00	82,550.00	17,866,035.00
190	B. Pendapatan Non Operasional	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	17,783,485.00	0.00	82,550.00	17,866,035.00
150	C. PENGELUARAN	0.00	0.00	0.00	0.00
161	a. Beban Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00
165	- Honor Karyawan	16,700,000.00	0.00	0.00	16,700,000.00
166	- THR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
167	- Beban Lainnya	1,565,500.00	0.00	0.00	1,565,500.00
	Sub Total	18,285,500.00	0.00	0.00	18,285,500.00
168	b. Beban Adm dan Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
169	- Beban Administrasi	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
170	- Beban Perlengkapan	3,069,312.00	287,604.00	0.00	3,356,916.00
171	- Beban Alat Tulis	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
	Sub Total	3,543,312.00	287,604.00	0.00	3,830,916.00
172	c. beban Organisasi	0.00	0.00	0.00	0.00
173	- Beban Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
179	- Beban Bunga	6,314,986.00	1,529,582.00	0.00	7,844,568.00
181	- Beban Lainnya	734,250.00	0.00	0.00	734,250.00
	Sub Total	7,049,236.00	1,529,582.00	0.00	8,578,818.00
200	D. Beban Non Operasional	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BIAYA	28,878,048.00	1,817,186.00	0.00	30,695,234.00
330	E. SISA HASIL USAHA	-11,094,563.00	0.00	0.00	(12,829,199.00)
	Sub Total	(11,094,563.00)	0.00	0.00	(12,829,199.00)
		(11,094,563.00)	0.00	0.00	(12,829,199.00)

Diketahui

Pembukuan

SANDI	PERKIRAAN	SALDO AWAL HARI	MUTASI		SALDO AKHIR
			DEBET	KREDIT	
100	A. PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
112	i. Pendapatan Jasa Piutang	39,178,815.00	0.00	1,858,400.00	41,037,215.00
113	ii. Pendapatan Jasa Bank	3,310,540.00	0.00	0.00	3,310,540.00
114	iii. Pendapatan Jasa Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
115	iv. Pendapatan Administrasi	7,203,000.00	0.00	200,000.00	7,403,000.00
	Sub Total	49,692,355.00	0.00	2,058,400.00	51,750,755.00
190	B. Pendapatan Non Operasional	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	49,692,355.00	0.00	2,058,400.00	51,750,755.00
150	C. PENGELUARAN	0.00	0.00	0.00	0.00
161	a. Beban Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00
165	- Honor Karyawan	20,250,000.00	0.00	0.00	20,250,000.00
166	- THR	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
167	- Beban Lainnya	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00
	Sub Total	22,590,000.00	0.00	0.00	22,590,000.00
168	b. Beban Adm dan Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
169	- Beban Administrasi	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
170	- Beban Perlengkapan	3,163,587.00	377,487.00	0.00	3,541,074.00
171	- Beban Alat Tulis	1,877,000.00	0.00	0.00	1,877,000.00
	Sub Total	5,048,587.00	377,487.00	0.00	5,426,074.00
172	c. beban Organisasi	0.00	0.00	0.00	0.00
173	- Beban Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
179	- Beban Bunga	17,090,132.00	0.00	0.00	17,090,132.00
181	- Beban Lainnya	343,500.00	0.00	0.00	343,500.00
	Sub Total	17,433,632.00	0.00	0.00	17,433,632.00
200	D. Beban Non Operasional	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BIAYA	45,072,219.00	377,487.00	0.00	45,449,706.00
330	E. SISA HASIL USAHA	4,620,136.00	0.00	0.00	6,301,049.00
	Sub Total	4,620,136.00	0.00	0.00	6,301,049.00
		4,620,136.00	0.00	0.00	6,301,049.00

Diketahui

Pembukuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website :www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: data.p3m@gmail.com

28 November 2016

Nomor : B-099.a /In.27/L.I/TL.00/ 11 /2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan BMT Sakinah Masjid Baburrahim
Batu Basa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Reza Rezita / 12231063
Tempat/Tgl. Lahir : Pesisir Selatan, 18 Agustus 1992
NIK : KTP. 1304045808920004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Balai Labuah Ateh Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Penerapan PSAK Nomor 101 pada BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan**
Lokasi : BMT Sakinah Masjid Baburrahim
Waktu : 29 November 2016 s.d 29 Januari 2017
Pembimbing 1 : Dr. Rizal, M.Ag.
2 : Elfina Yenti, SE., M.Si., Akt., CA.

Untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.



**BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BMT SAKINAH
MASJID BABURRAHIM BATUBASA**

Batubasa, 17 Februari 2017

No. : 01 / BMT – SKN /II/2017
Lampiran : ...
Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
di-
TEMPAT

Sehubungan dengan surat dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Nomor B-099.a /In.27/L.I/TL.00/11/2016 tanggal 28 November 2016 Hal Mohon Izin Penelitian dalam rangka proses penulisan laporan hasil penelitian mahasiswa atas nama Reza Rezita No. BP 12231063 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul penelitian "Penerapan PSAK Nomor 101 pada BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan". Dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan penelitian data tersebut dapat disetujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia BMT dan Jabatan.

Demikian kami sampaikan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BMT "Sakinah"
Masjid Baburrahim Batubasa



Miftah Novi T. M. Ag
Manager